



PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 126 TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAMENKANG
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar;
 - b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal untuk Unit Kerja yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Pamengkang Kabupaten Cirebon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang

- Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 3, Seri E.3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Seri E.2);
 18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
 19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 11, Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2);
 20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi, Fungsi Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 43, Seri D.11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAMENKANG KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Cirebon yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Pamengkang, yang selanjutnya disebut Puskesmas Pamengkang adalah UPTD Puskesmas Pamengkang.
9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

11. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
12. Pelayanan Kesehatan Puskesmas adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
16. Puskesmas nonrawat inap merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (*home care*), pelayanan gawat darurat, dan pelayanan persalinan normal bagi Puskesmas yang tersedia fasilitas pelayanan persalinan normal.
17. Puskesmas rawat inap merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam

melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas.

- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, dan Batas Waktu Pencapaian

Pasal 4

Jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Pamengkang, meliputi:

- a. UKP tingkat pertama; dan
- b. UKM tingkat pertama.

Pasal 5

UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. Pelayanan pemeriksaan umum;
- b. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
- d. Pelayanan gawat darurat;
- e. Pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. Pelayanan persalinan;
- g. Pelayanan kefarmasian; dan
- h. Pelayanan laboratorium.

Pasal 6

UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pelayanan kesehatan dasar, meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV);
- m. Pelayanan imunisasi;
- n. Pelayanan penyakit lainnya (kusta, DBD, pneumonia, diare, filariasis, dan hepatitis);
- o. Pelayanan promosi kesehatan;
- p. Pelayanan kesehatan lingkungan;
- q. Pelayanan gizi;
- r. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- s. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- t. Pelayanan kesehatan kerja;
- u. Pelayanan kesehatan olahraga;
- v. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- w. Pelayanan kesehatan indera; dan
- x. pelayanan kesehatan pengembangan lainnya.

Pasal 7

- (1) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk UKP pada Puskesmas Pamengkang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada jenis pelayanan untuk UKM pada Puskesmas Pamengkang, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Uraian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENERAPAN

Pasal 9

- (1) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
 - a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - e. Penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
 - f. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - g. Pelaksanaan anggaran; dan
 - h. Akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.

- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD Puskesmas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2020

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 129 SERI B

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON.

NOMOR : 126 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PAMENGGKANG KABUPATEN CIREBON

**INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN
UNTUK UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PADA PUSKESMAS PAMENGGKANG**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	PENCAPAIAN AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan pemeriksaan umum	a. Waktu tunggu pendaftaran <10 menit	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	Petugas pendaftaran
		b. Kelengkapan data pasien setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Petugas rekam medis

4	Pelayanan gawat darurat	<p>a. Pemberi pelayanan kegawatdaruratan bersertifikasi (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS) yang berlaku</p> <p>b. Kemampuan menangani <i>life saving</i> anak dan dewasa</p> <p>c. Kelengkapan informed consern sebelum Tindakan medis</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung Jawab Tata Usaha
5	Pelayanan gizi yang bersifat UKP	<p>a. Pemberi pelayanan gizi</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung Jawab Tata Usaha

		b. Kepuasan pelanggan pada pelayanan gizi	≥ 80 %	80%	80%	85%	90%	95%	100%	Programmer Gizi	
6	Pelayanan kefarmasian	a. Pemberi pelayanan farmasi	Tersedia Tenaga Apoteker	Penanggung Jawab Tata Usaha							
		b. Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi	Tersedia ruang dan peralatan	Koordinator Kefarmasian							
		c. Ketersediaan formularium	Tersedia dan updated paling lama 3 tahun	Koordinator Kefarmasian							
		d. Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 5 menit	5 menit	4 menit	3 menit	2 menit	2 menit	2 menit	2 menit	Koordinator Kefarmasian
		e. Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤ 7 menit	7 menit	6 menit	5 menit	4 menit	3 menit	3 menit	3 menit	Koordinator Kefarmasian

		f. Tidak adanya kejadian salah pemberian obat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Koordinator Kefarmasian	
		g. Kepuasan pasien pada pelayanan farmasi	≥ 80 %	80%	80%	80%	85%	90%	95%	100%	Koordinator Kefarmasian
8	Pelayanan laboratorium	a. Pemberian pelayanan laboratorium	Tersedia-nya tenaga Analis	Tersedianya tenaga Analis	Tersedia-nya tenaga Analis	Tersedia-nya tenaga Analis	Tersedia-nya tenaga Analis	Tersedia-nya tenaga Analis	Tersedia-nya tenaga Analis	Tersedia-nya tenaga Analis	Penanggung Jawab Tata Usaha
		b. Fasilitas dan peralatan	Sesuai dengan standar Puskesmas	Koordinator Laboratorium							
		c. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 120 menit	20 menit	20	18	15	12	10	10	Koordinator Laboratorium

	baku mutu eksternal												
	i. Kepuasan pasien pada pelayanan laboratorium	≥ 80 %	80%	85%	90%	95%	100%	Koordinator Laboratorium					

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2020
BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 3 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 129 SERI B

4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %	98,70 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bidan Koordinator, Koordinator MTBM, MTBS dan Nutrisi
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	84,42 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung Jawab UKM Pengembangan
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	5,75 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	7,82 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	Penanggung Jawab UKM Pengembangan

8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	66,46 %	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	59,01 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	85,71 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TB)	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas

12	pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %	0	85 %	90 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas
13.	Pelayanan Imunisasi	a. Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)	93 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas
		b. Cakupan IDL	93 %	103,54 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas
		c. Cakupan BIAS Td	98 %	98,79 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		d. Cakupan penemuan penderita diare	100 %	51,66 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas
		e. Cakupan tatalaksana kasus Filariasis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas
15.	Pelayanan Promosi Kesehatan	Pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga	70 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas
16.	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pengawasan rumah sehat	100 %	77,22 %	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas
17.	Pelayanan Gizi	a. ASI Eksklusif	50 %	54,06 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas

24.	Pelayanan Kesehatan Pengembangan Lainnya	a. Cakupan kelengkapan surveilans terpadu penyakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung Jawab UKM Pengembangan
		b. Cakupan ketepatan surveilans terpadu penyakit	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 30 November 2020

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 3 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 129 SERI B

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 126 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PAMENGGANG
KABUPATEN CIREBON**A. INDIKATOR SPM UKP****1. Pelayanan Pemeriksaan Umum****a. Waktu tunggu pendaftaran <10 menit**

Judul	Waktu tunggu pendaftaran <10 menit
Dimensi Mutu	Kualitas dan keamanan
Tujuan	Teregistrasinya pasien sesuai dengan substandar waktu yang ditetapkan (cepat, tepat, dan akurat)
Definisi Operasional	Lama waktu pendaftaran adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari pasien diidentifikasi sampai sesuai dengan standar SIK
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah rata-rata yang dibutuhkan untuk registrasi sesuai standar SIK dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah kunjungan yang teregistrasi dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Registrasi kunjungan
Standar	100%
Langkah Kegiatan	Persiapan sarana dan prasarana, pengaturan tenaga dan sampling survei
Penanggung jawab	Petugas Pendaftaran

b. Kelengkapan data pasien setelah mendapatkan informasi yang jelas

Judul	Kelengkapan data pasien setelah mendapatkan informasi yang jelas
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya tanggung jawab rekam medis

	untuk memberikan informasi kepada pasien dan mendapatkan informasi dari pasien
Definisi Operasional	Data pasien adalah persetujuan yang diberikan kepada pasien/keluarga pasien atas dasar penjelasan lengkap mengenai rekam medis pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah pasien yang didata
Denominator	Jumlah pasien yang mendapat rekam medis yang disurvei dalam 1 bulan
Sumber Data	Survei
Standar	100 %
Penanggung jawab	Petugas Rekam Medis

c. Pelayanan pemeriksaan umum

Judul	Pelayanan pemeriksaan umum
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Tersedianya pelayanan rawat jalan oleh tenaga yang kompeten
Definisi Operasional	Pemberi pelayanan rawat jalan adalah dokter dan tenaga perawat yang kompeten (minimal D3)
Frekuensi Pengumpulan Data	6 bulan
Periode Analisa	6 bulan
Numerator	Jumlah tenaga dokter dan perawat yang memberikan pelayanan di ruang rawat jalan yang sesuai dengan ketentuan
Denominator	Jumlah seluruh tenaga dokter dan perawat yang bertugas di rawat jalan
Sumber Data	Kepegawaian
Standar	100 %
Penanggung jawab	Penanggung Jawab Tata Usaha

d. Waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan

Judul	Waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan
Dimensi Mutu	Efektivitas, kenyamanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan pendaftaran rawat jalan
Definisi Operasional	Dokumen Rekam Medis Rawat Jalan adalah dokumen rekam medis pasien baru atau pasien lama yang digunakan pada pelayanan rawat jalan. Waktu penyediaan dokumen rekam medis mulai dari pasien mendaftar sampai rekam medis disediakan/ditemukan oleh petugas
Frekuensi Pengumpulan Data	Tiap bulan
Periode Analisa	Tiap 3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu penyediaan rekam medis sampel rawat jalan yang diamati
Denominator	Total sampel penyediaan rekam medis yang diamati (N tidak kurang dari 50)
Sumber Data	Hasil survei pengamatan di ruang pendaftaran rawat jalan untuk pasien baru/di ruang rekam medis untuk pasien lama
Standar	≤ 10 menit
Penanggung jawab	Petugas Rekam Medis

2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Judul	Pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Setiap pasien yg membutuhkan pelayanan kesehatan gigi dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan gigi yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan pelayanan sehingga dapat mengatasi masalah kesehatan gigi
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pasien yang dilayani oleh petugas setiap hari
Denominator	Jumlah semua pasien yang dilayani petugas secara

	kumulatif dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Laporan harian, laporan bulanan
Standar	100 %
Penanggung jawab	Dokter gigi dan perawat gigi

3. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKP

a. Pelayanan KIA

Judul	Pelayanan KIA
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua Pasangan Usia Subur (PUS), Ibu hamil (Bumil), Ibu Bersalin (Bulin) dan Ibu Nifas (Bufas) yang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada PUS Bumil Bulin Bufas yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tetap terpelihara kesehatannya sehingga dapat menjaga kondisi tetap sehat dan produktif sesuai kemampuannya
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari dan direkap setiap bulan
Periode Analisa	Tiap bulan
Numerator	Jumlah PUS, Bumil, Bulin, Bufas yang datang dan dilayani oleh petugas kesehatan setiap hari
Denominator	Jumlah semua PUS, Bumil, Bulin, Bufas secara kumulatif yang dilayani dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Register harian dan laporan bulanan program KIA
Standar	100%
Penanggung jawab	Bidan koordinator

b. Pelayanan KB

Judul	Pelayanan KB
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua PUS yg membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada PUS yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tetap terpelihara kesehatannya sehingga dapat

	menjaga kondisi tetap sehat dan produktif sesuai kemampuannya
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari dan direkap setiap bulan
Periode Analisa	Tiap bulan
Numerator	Jumlah PUS yang datang dan dilayani oleh petugas kesehatan setiap hari
Denominator	Jumlah semua PUS secara kumulatif yang dilayani dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Register harian dan laporan bulanan program KIA
Standar	100%
Penanggung jawab	Bidan koordinator

c. Pelayanan imunisasi

Judul	Pelayanan imunisasi
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas serta taat SOP
Tujuan	Semua sasaran imunisasi dapat terlayani dengan baik dan sesuai SOP
Definisi Operasional	Pemberian imunisasi kepada semua sasaran imunisasi (bayi) agar mendapatkan kekebalan tubuh kepada beberapa penyakit PD3I
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan, triwulan dan tahunan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan imunisasi dari petugas kesehatan
Denominator	Jumlah kumulatif semua sasaran yang mendapatkan imunisasi dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Laporan kegiatan bulanan petugas imunisasi
Standar	97.5 %
Penanggung jawab	Koordinator Imunisasi

d. Pelayanan MTBS

Judul	Pelayanan MTBS
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas

Tujuan	Semua pasien bayi, balita yang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada bayi, balita yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tetap terpelihara kesehatannya sehingga dapat menjaga kondisi tetap sehat dan produktif sesuai kemampuannya
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari dan direkap setiap bulan
Periode Analisa	Tiap bulan
Numerator	Jumlah bayi, balita yang datang dan dilayani oleh petugas kesehatan setiap hari
Denominator	Jumlah semua bayi, balita secara kumulatif yang dilayani dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Register harian dan laporan bulanan program MTBS
Standar	100%
Penanggung jawab	Petugas MTBS

4. Pelayanan Gawat Darurat

a. Pemberi pelayanan kegawatdaruratan bersertifikasi (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS) yang masih berlaku

Judul	Pemberi pelayanan kegawatdaruratan bersertifikasi (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS) yang masih berlaku
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Tersedianya Pelayanan gawat darurat oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidang kegawatdaruratan
Definisi Operasional	Tenaga kesehatan yang berkompeten pada gawat darurat adalah tenaga yang sudah memiliki sertifikat pelatihan ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	3 bulan sekali
Numerator	Jumlah tenaga yang bersertifikat ATLS/

	BTLS/ACLS/PPGD/GELS
Denominator	Jumlah tenaga yang memberikan pelayanan kegawatdaruratan
Sumber Data	Kepegawaian
Standar	100 %
Penanggung jawab	Penanggung Jawab Tata Usaha

b. Kemampuan menangani *life saving* anak dan dewasa

Judul	Kemampuan menangani <i>life saving</i> anak dan dewasa
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kemampuan Puskesmas dalam memberikan Pelayanan Gawat Darurat
Definisi Operasional	<i>Life Saving</i> adalah upaya penyelamatan jiwa manusia dengan urutan Airway, Breath, Circulation
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	3 bulan sekali
Numerator	Jumlah kumulatif pasien yang mendapat pertolongan <i>life saving</i> di Unit Gawat Darurat
Denominator	Jumlah seluruh pasien yang membutuhkan penanganan <i>life saving</i> di Unit Gawat Darurat
Sumber Data	Rekam medis di Unit Gawat Darurat
Standar	100 %
Penanggung jawab	Koordinator UKP

c. Kelengkapan *informed consern* sebelum tindakan medis

Judul	Kelengkapan <i>informed consern</i> sebelum tindakan medis
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya tanggung jawab dokter untuk memberikan informasi kepada pasien dan mendapat persetujuan dari pasien akan tindakan medis yang akan dilakukan
Definisi Operasional	<i>Informed consern</i> adalah persetujuan yang diberikan pasien/keluarga pasien atas dasar penjelasan lengkap mengenai tindakan medis

	yang akan dilakukan kepada pasien tersebut
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah pasien yang mendapat tindakan medis yang disurvei yang mendapatkan informasi lengkap sebelum memberikan persetujuan tindakan medis dalam 1 bulan
Denominator	Jumlah pasien yang mendapat tindakan medis yang disurvei dalam 1 bulan
Sumber Data	Survei
Standar	100 %
Penanggung jawab	Koordinator UKP

5. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP

a. Pemberi pelayanan gizi

Judul	Pemberi pelayanan gizi
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektivitas
Tujuan	Kesiapan Puskesmas dalam menyediakan pelayanan gizi
Definisi Operasional	Pemberi pelayanan gizi adalah tenaga terlatih gizi yang mempunyai kompetensi sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pelayanan gizi di Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Tiga bulan sekali
Periode Analisa	Tiga bulan sekali
Numerator	Jumlah dan jenis tenaga terlatih gizi yang memberi pelayanan gizi
Denominator	1
Sumber Data	Kepegawaian
Standar	100%
Penanggung jawab	Penanggung Jawab Tata Usaha

b. Kepuasan pelanggan pada pelayanan gizi

Judul	Kepuasan pelanggan pada pelayanan gizi
Dimensi Mutu	Kenyamanan
Tujuan	Tergambarnya persepsi pelanggan terhadap

	elayanan gizi
Definisi Operasional	Kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan terhadap pelayanan gizi
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yang disurvei
Denominator	Jumlah total pasien yang disurvei (N minimal 50)
Sumber Data	Survei
Standar	≥ 80 %
Penanggung jawab	Programmer Gizi

6. Pelayanan Kefarmasian

a. Pemberi pelayanan farmasi

Judul	Pemberi pelayanan farmasi
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektivitas
Tujuan	Kesiapan Puskesmas dalam memberikan pelayanan obat
Definisi Operasional	Pemberi pelayanan obat adalah asisten apoteker yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Tiga bulan sekali
Periode Analisa	Tiga bulan sekali
Numerator	Jumlah dan jenis tenaga yang ada di ruang/kamar obat
Denominator	Jumlah dan jenis seluruh tenaga yang ada di ruang/kamar obat
Sumber Data	Kamar obat
Standar	Tersedia tenaga Apoteker
Penanggung jawab	Penanggung Jawab Tata Usaha

b. Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi

Judul	Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektivitas

Tujuan	Kesiapan fasilitas dan peralatan Puskesmas untuk memberikan pelayanan obat
Definisi Operasional	Fasilitas dan peralatan pelayanan obat adalah ruang, dan peralatan yang harus tersedia untuk pelayanan obat sesuai dengan standar pelayanan obat Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Tiga bulan
Periode Analisa	Tiga bulan
Numerator	Jenis dan jumlah fasilitas dan peralatan pelayanan obat yang dimiliki Puskesmas
Denominator	Jenis dan fasilitas dan peralatan pelayanan obat yang seharusnya dimiliki Puskesmas
Sumber Data	Kamar obat
Standar	Tersedia ruang dan peralatan
Penanggung jawab	Koordinator Kefarmasian

c. Ketersediaan formularium

Judul	Ketersediaan formularium
Dimensi Mutu	Efisiensi
Tujuan	Tergambarnya efisiensi pelayanan obat kepada pasien
Definisi Operasional	Formularium obat adalah daftar obat yang digunakan di Puskesmas sesuai dengan formularium nasional
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Dokumen formularium
Denominator	1
Sumber Data	Survei
Standar	Tersedia dan updated paling lama 3 tahun terakhir
Penanggung jawab	Koordinator Kefarmasian

d. Waktu tunggu pelayanan obat jadi

Judul	Waktu tunggu pelayanan obat jadi
Dimensi Mutu	Efektivitas, kesinambungan pelayanan, dan efisiensi

Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan obat
Definisi Operasional	Waktu tunggu pelayanan obat jadi adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat jadi pasien yang disurvei
Denominator	Jumlah pasien yang di survei dalam bulan tersebut
Sumber Data	Survei
Standar	≤ 5 menit
Penanggung jawab	Koordinator Kefarmasian

e. Waktu tunggu pelayanan obat racikan

Judul	Waktu tunggu pelayanan obat racikan
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektivitas
Tujuan	Kesiapan Puskesmas dalam memberikan pelayanan obat
Definisi Operasional	Waktu tunggu pelayanan adalah obat racikan adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat-obatan
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat racikan yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pasien yang disurvei dalam bulan tersebut
Sumber Data	Survei
Standar	≤ 7 menit
Penanggung jawab	Koordinator Kefarmasian

f. Tidak adanya kejadian salah pemberian obat

Judul	Tidak adanya kejadian salah pemberian obat
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kenyamanan

Tujuan	Tergambarnya kejadian kesalahan dalam pemberian obat
Definisi Operasional	Kesalahan pemberian obat, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Salah dalam memberikan jenis obat 2. Salah dalam memberikan dosis 3. Salah orang 4. Salah jumlah
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah seluruh pasien instalasi obat yang disurvei dikurangi jumlah pasien yang mengalami kesalahan pemberian obat
Denominator	Jumlah seluruh pasien instalasi obat yang disurvei
Sumber Data	Survei
Standar	100 %
Penanggung jawab	Koordinator Kefarmasian

g. Kepuasan pasien pada pelayanan farmasi

Judul	Kepuasan pasien pada pelayanan farmasi
Dimensi Mutu	Kenyamanan
Tujuan	Tergambarnya persepsi pelanggan terhadap pelayanan obat
Definisi Operasional	Kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan terhadap pelayanan obat
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yang disurvei (dalam persentase)
Denominator	Jumlah total pasien yang disurvei (N minimal 50)
Sumber Data	Survei
Standar	≥ 80 %
Penanggung jawab	Koordinator Kefarmasian

7. Laboratorium

a. Pemberi pelayanan laboratorium

Judul	Pemberi pelayanan laboratorium
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektivitas
Tujuan	Kesiapan Puskesmas dalam memberikan pelayanan laboratorium
Definisi Operasional	Pemberi pelayanan laboratorium adalah analis laboratorium yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	3 bulan sekali
Periode Analisa	3 bulan sekali
Numerator	Jumlah dan jenis tenaga yang ada di ruang laboratorium
Denominator	Jumlah dan jenis seluruh tenaga yang ada di ruang laboratorium
Sumber Data	Ruang Laboratorium
Standar	Tersedianya tenaga Analis
Penanggung jawab	Penanggung Jawab Tata Usaha

b. Fasilitas dan Peralatan

Judul	Fasilitas dan Peralatan
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektivitas
Tujuan	Kesiapan fasilitas dan peralatan Puskesmas untuk memberikan pelayanan laboratorium
Definisi Operasional	Fasilitas dan peralatan laboratorium sederhana adalah ruang, mesin, dan peralatan yang harus tersedia untuk pelayanan laboratorium sederhana baik cito maupun elektif sesuai standar pelayanan Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Tiga bulan sekali
Periode Analisa	Tiga bulan sekali
Numerator	Jenis dan jumlah fasilitas, mesin, dan peralatan pelayanan laboratorium yang dimiliki Puskesmas
Denominator	Jenis dan jumlah fasilitas, mesin, dan peralatan pelayanan laboratorium yang

	seharusnya dimiliki Puskesmas
Sumber Data	Inventaris laboratorium
Standar	Sesuai dengan standar Puskesmas
Penanggung jawab	Koordinator Laboratorium

c. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium

Judul	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium
Dimensi Mutu	Efektivitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan laboratorium
Definisi Operasional	Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium sederhana. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium adalah tenggang waktu mulai pasien diambil sampel sampai dengan menerima hasil
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium pasien yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut
Sumber Data	Survei
Standar	≤ 120 menit
Penanggung jawab	Koordinator Laboratorium

d. Tidak adanya kejadian tertukar spesimen

Judul	Tidak adanya kejadian tertukar spesimen
Dimensi Mutu	Keselamatan pasien
Tujuan	Tergambarnya ketelitian dalam pelaksanaan pengelolaan spesimen laboratorium
Definisi Operasional	Kejadian tertukar spesimen pemeriksaan laboratorium adalah tertukarnya spesimen milik orang yang satu dengan orang lain

Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan dan sentinel <i>event</i>
Periode Analisa	1 bulan dan sentinel <i>event</i>
Numerator	Jumlah seluruh spesimen laboratorium yang diperiksa dikurangi jumlah spesimen yang tertukar
Denominator	Jumlah seluruh spesimen laboratorium yang diperiksa
Sumber Data	Rekam medis, laporan keselamatan pasien
Standar	100 %
Penanggung jawab	Koordinator Laboratorium

e. Kemampuan memeriksa HIV-AIDS

Judul	Kemampuan memeriksa HIV-AIDS
Dimensi Mutu	Efektivitas dan keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kemampuan laboratorium Puskesmas dalam memeriksa HIV-AIDS
Definisi Operasional	Pemeriksaan laboratorium HIV/AIDS adalah pemeriksaan <i>skrining</i> HIV kepada pasien yang diduga mengidap HIV/AIDS
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Ketersediaan peralatan untuk pemeriksaan Rapid Test
Denominator	1
Sumber Data	Catatan di laboratorium
Standar	Tersedia
Penanggung jawab	Koordinator Laboratorium

f. Kemampuan Mikroskopis TB Paru

Judul	Kemampuan Mikroskopis TB Paru
Dimensi Mutu	Efektivitas dan keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kemampuan laboratorium Puskesmas dalam memeriksa mikroskopis <i>tuberkulosis</i> paru
Definisi Operasional	Pemeriksaan mikroskopis <i>tuberkulosis</i> paru

	adalah pemeriksaan mikroskopis untuk mendeteksi adanya <i>mycobacterium tuberculosis</i> pada sediaan dahak pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Ketersediaan tenaga terlatih, peralatan, dan reagen untuk pemeriksaan <i>tuberculosis</i>
Denominator	Sesuai dengan standar Puskesmas
Sumber Data	Catatan di laboratorium
Standar	Tersedianya tenaga, peralatan, dan reagen
Penanggung jawab	Koordinator Laboratorium

g. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium

Judul	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium
Definisi Operasional	Kesalahan administrasi dalam pelayanan laboratorium meliputi kesalahan identifikasi, kesalahan registrasi, kesalahan pelabelan sampel, dan kesalahan penyerahan hasil laboratorium
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah pasien yang diperiksa tanpa kesalahan administrasi dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium dalam bulan tersebut
Sumber Data	Catatan di laboratorium
Standar	100 %
Penanggung jawab	Koordinator Laboratorium

h. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal

Judul	Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal
-------	---

Dimensi Mutu	Keselamatan, efektivitas, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kualitas pemeriksaan laboratorium
Definisi Operasional	Baku mutu eksternal adalah pemeriksaan mutu pelayanan laboratorium oleh pihak yang kompeten di luar Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	3 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah parameter diperiksa yang sesuai standar
Denominator	Jumlah seluruh parameter yang diperiksa
Sumber Data	Hasil pemeriksaan baku mutu eksternal
Standar	100 %
Penanggung jawab	Koordinator Laboratorium

i. Kepuasan pasien pada pelayanan laboratorium

Judul	Kepuasan pasien pada pelayanan laboratorium
Dimensi Mutu	Kenyamanan
Tujuan	Tergambarnya persepsi pelanggan terhadap pelayanan laboratorium
Definisi Operasional	Kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan terhadap pelayanan laboratorium
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yang disurvei (dalam persentase)
Denominator	Jumlah total pasien yang disurvei (N minimal 50)
Sumber Data	Survei
Standar	≥ 80 %
Penanggung jawab	Koordinator Laboratorium

B. INDIKATOR SPM UKM

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Judul	Pelayanan kesehatan ibu hamil
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kemampuan Puskesmas dalam mengakses pelayanan ibu hamil
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan ibu hamil adalah pelayanan kesehatan ibu hamil yang mendapatkan kunjungan 4 kali selama periode kehamilan sesuai standar 10T di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah sasaran bumil di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	Simpus dan kohort ibu
Standar	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan bumil, pembuatan kantong persalinan, pelayanan antenatal, pencatatan pelaporan, Monev dan PWS
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Judul	Pelayanan kesehatan ibu bersalin
Dimensi Mutu	Akses dan keterjangkauan
Tujuan	Supaya persalinan di lakukan di fasilitas pelayanan kesehatan
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah pelayanan kesehatan ibu bersalin pada persalinan normal dan komplikasi sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	3 bulan

Nominator	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Semua persalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Pamengkang
Sumber Data	Buku KIA
Standar	100 %
Penanggung jawab	Bidan Koordinator

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Judul	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Terpeliharanya kesehatan bayi umur 0-28 hari melalui pelayanan kesehatan maupun pelayanan melalui kunjungan rumah
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah jumlah bayi usia 0-28 yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah bayi usia 0-28 yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar, di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Denominator	Seluruh bayi lahir hidup di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Simpus, kohort ibu, kohort bayi
Standar	100%
Langkah Kegiatan	Pemantauan paska persalinan dan MTBM, pelayanan kunjungan neonatus di dalam gedung dan di luar gedung, pelayanan kunjungan neonatus, audit kesakitan dan kematian neonatus, PWS
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Judul	Pelayanan kesehatan balita
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Menemukan secara dini gangguan kesehatan dan kelainan tumbuh kembang yang terjadi pada balita
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan balita adalah balita usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun meliputi : a. Pelayanan kesehatan balita sehat b. Pelayanan kesehatan balita sakit
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah kumulatif balita usia 0-59 bulan yang dideteksi kesehatan dan tumbuh kembangnya sesuai standar oleh dokter, bidan dan perawat di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah balita umur 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	Simpus, kohort balita, buku KIA, KMS dan register MTBS
Standar	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan kompetensi kesehatan balita (MTBM, MTBS, SDIDTK) pelayanan kunjungan balita dan pra sekolah di dalam maupun di luar gedung serta pelayanan rujukan
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator, Koordinator MTBM, MTBS dan Nutrisionis

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Judul	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapat skrining kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah pelayanan kesehatan pada anak usia

	pendidikan dasar kelas 1 sampai dengan kelas 9 sesuai standar di wilayah kerja minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu tahun sekali
Periode Analisa	Satu tahun sekali
Nominator	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai dengan 9 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan
Denominator	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai dengan 9 di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	Hasil pencatatan dan pelaporan penjangkaran anak sekolah (status gizi, tanda vital, kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan indera)
Standar	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, pemberian pelayanan skrining kesehatan, tindak lanjut hasil penjangkaran, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab UKM Pengembangan

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Judul	Pelayanan kesehatan pada usia produktif
Dimensi Mutu	Kualitas dan kontinuitas
Tujuan	Setiap warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
Definisi operasional	Pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

Denominator	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Simpus dan hasil pencatatan dan pelaporan kunjungan pasien, serta hasil kegiatan Posbindu
Standar	100%
Langkah Kegiatan	Skrining faktor resiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku, konseling, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Judul	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Melayani usia lanjut yang berbentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk rujukannya
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah cakupan pengunjung usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode analisa	3 bulan sekali
Nominator	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali setahun dalam kurun waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah seluruh penduduk usia 60 tahun ke atas di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Sumber data	Buku pedoman Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia dan buku pedoman Puskesmas Santun Lanjut Usia
Standar	100%
Langkah kegiatan	Pendataan, perencanaan kegiatan, pelayanan
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Pengembangan

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Judul	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
Dimensi Mutu	Keselamatan

Tujuan	Untuk memudahkan agar dapat dilakukan upaya promotif, preventif, dan kuratif sederhana
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi adalah Setiap penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	3 bulan sekali
Nominator	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah estimasi penderita Hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja berdasarkan angka prevalensi Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
Sumber Data	PIS-PK
Standar	100%
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Judul	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)
Dimensi Mutu	Kesehatan, keselamatan
Tujuan	Sebagai acuan petugas untuk menemukan kasus baru penderita diabetes melitus
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan penderita DM adalah Cakupan jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada usia 15 tahun ke atas
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tahun
Nominator	Jumlah penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun

Denominator	Jumlah estimasi penderita DM berdasarkan angka prevalensi Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
Sumber Data	Kohort kunjungan penderita Diabetes Melitus
Standar	100 %
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Judul	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	pemeriksaan untuk melihat adanya gejala awal gangguan kesehatan jiwa dengan metode 2 menit
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat adalah Jumlah ODGJ berat di Puskesmas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan sekali
Periode analisa	1 bulan sekali
Nominator	Jumlah ODGJ berat di Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.
Denominator	Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	Kohort Kunjungan Penderita ODGJ
Standar	100%
Langkah kegiatan	Penyediaan buku pedoman Keswa, pelayanan kesehatan ODGJ berat di Puskesmas, pelaksanaan kunjungan rumah, monitoring dan evaluasi.
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas

11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)

Judul	Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB)
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis adalah jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan TB
Standar	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM TB, penyediaan KIE TB, pelayanan dan pemeriksaan TB, rujukan kasus TB, jejaring kemitraan pelayanan TB, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

Judul	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna NAPZA dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV adalah pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu minggu satu kali
Periode Analisa	Setiap satu tahun

Nominator	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapat pengobatan HIV sesuai standar di Fasyankes dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan program HIV
Standar	100%
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas

13. Pelayanan Imunisasi

a. Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)

Judul	Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Mengetahui akses wilayah terhadap kelengkapan dan intensitas imunitas yang didapatkan dari sasaran bayi (0-12 bulan)
Definisi Operasional	Cakupan desa UCI adalah desa dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah desa UCI di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah desa yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Sumber data	Simpus, kohort bayi, KMS/buku KIA serta buku catatan imunisasi
Standar	93 %
Langkah kegiatan	Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik dan PWS imunisasi dan Monev
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas

b. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)

Judul	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas

Tujuan	Memberikan kekebalan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)
Definisi Operasional	Cakupan IDL adalah Cakupan bayi 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap (BCG 1 kali, Polio 4 kali, DPTHB-Hib 3 kali, Campak 1 kali) di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu satu tahun meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Imunisasi HB0 2. Imunisasi Polio 1 sampai dengan 4 3. Imunisasi DPTHiB 1 sampai dengan 3 4. Imunisasi Campak
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah bayi 0-11 bulan mendapatkan imunisasi di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran bayi 0-11 bulan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun x 100%
Sumber data	Simpus, kohort bayi, KMS/buku KIA serta buku catatan imunisasi
Standar	93 %
Langkah kegiatan	Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik, pelayanan imunisasi dan PWS imunisasi
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas

c. Cakupan BIAS Td (Tetanus Difteria)

Judul	Cakupan BIAS Td
Dimensi Mutu	keselamatan
Tujuan	Pemberian imunisasi Td kepada seluruh siswa kelas 2 dan 5 SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang sederajat di wilayah kerja Puskesmas
Definisi Operasional	Cakupan Bias Td adalah jumlah siswa kelas 2 dan kelas 5 SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang sederajat yang mendapatkan imunisasi

	Td di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah siswa kelas 2 dan kelas 5 SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang sederajat yang mendapatkan imunisasi Td di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Denominator	jumlah siswa kelas 2 dan kelas 5 SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang sederajat di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	Laporan Bias
Standar	98 %
Langkah kegiatan	Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas

d. Cakupan BIAS DT (Difteria Tetanus)

Judul	Cakupan BIAS DT
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan boster DT kepada anak usia 6-8 tahun / kelas I SD sehingga menambah kekebalan anak dan terhindar dari penyakit Difteri dan Tetanus maupun komplikasinya
Definisi Operasional	Cakupan BIAS DT kelas I SD adalah kegiatan imunisasi anak SD atau sederajat dengan memberikan suntik DT pada murid kelas 1 SD.
Frekuensi pengumpulan data	Satu kali satu tahun
Periode analisa	Satu kali satu tahun
Nominator	Jumlah murid kelas SD yang mendapatkan imunisasi DT di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah murid kelas I SD yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Sumber data	Data anak SD kelas I absensi kelas

Standar	98 %
Langkah kegiatan	Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas

e. Cakupan BIAS MR (Measles Rubella)

Judul	Cakupan BIAS MR
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan boster MR kepada usia 6 tahun/ kelas 1 sehingga menambah kekebalan anak dan terhindar dari penyakit Campak dan Rubella.
Definisi Operasional	Cakupan BIAS MR adalah Jumlah siswa kelas 1 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang sederajat, laki-laki dan perempuan yang mendapat Imunisasi MR di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan September
Periode Analisa	Setiap bulan September
Nominator	Jumlah murid kelas 1 SD yang mendapat Imunisasi Campak di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah murid kelas 1 SD yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Sumber data	Data anak SD kelas 1, absensi kelas
Standar	98 %
Langkah kegiatan	Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik dan PWS Imunisasi
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas

14. Pelayanan penyakit lainnya (Kusta, DBD, ISPA/Pneumonia, Diare, Filariasis, dan Hepatitis)

a. Angka kesembuhan Kusta

Judul	Angka kesembuhan Kusta
Dimensi Mutu	Akses, hubungan antar manusia, efisiensi
Tujuan	Untuk mengetahui jumlah penderita kusta yang telah selesai dan sembuh dari pengobatan MB

Definisi Operasional	Adalah persentase yang menunjukkan jumlah pasien atau orang yang telah menyelesaikan pengobatan MB pada kurun waktu tertentu
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tiga bulan
Nominator	Jumlah pasien yang telah menyelesaikan pengobatan MB
Denominator	Jumlah seluruh pasien yang memulai pengobatan MB pada kurun waktu yang sama
Sumber data	Programer kusta
Standar	100%
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas

b. Cakupan Angka Bebas Jentik

Judul	Cakupan Angka Bebas Jentik
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Berkurangnya penderita kasus DBD di wilayah kerja
Definisi Operasional	Persentase rumah dan tempat-tempat umum yang diperiksa jentik
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah rumah dan tempat umum yang diperiksa jentik dan hasilnya negatif tidak ada jentik dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah rumah dan tempat-tempat umum yang diperiksa jentik x 100 %
Sumber data	Laporan P2 DBD, SP2TP
Standar	95 %
Langkah kegiatan	Penegakan diagnosa, tatalaksana, monev, dan Promkes
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas

c. Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita

Judul	Cakupan penemuan penderita Pneumonia balita
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas

Tujuan	Balita yang menderita Pneumonia mendapatkan tatalaksana penanganan sesuai standar
Definisi Operasional	Cakupan penemuan penderita Pneumonia balita adalah persentase balita dengan Pneumonia yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di sarana kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah penderita Pneumonia balita yang ditangani di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Sumber data	Laporan P2 ISPA
Standar	86 %
Langkah kegiatan	Penemuan penderita, pengobatan, kunjungan rumah, Promkes dan Monev
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas

d. Cakupan Penemuan Penderita Diare

Judul	Cakupan penemuan penderita diare
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Pasien dengan diare mendapatkan tatalaksana penanganan sesuai standar sehingga tidak berakibat dehidrasi
Definisi Operasional	Pasien dengan Diare yang ditangani adalah pasien dengan Diare yang penanganannya sesuai dengan standar di wilayah kerja dalam periode/kurun waktu tertentu
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah penderita dengan Diare yang ditangani sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

Denominator	Jumlah seluruh penderita Diare yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Sumber data	Laporan P2 Diare, SP2TP
Standar	100%
Langkah kegiatan	Penegakan diagnosa, tatalaksana, Monev dan Promkes
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas

e. Cakupan Tatalaksana Kasus Filariasis

Judul	Cakupan tatalaksana kasus Filariasis
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Pasien dengan filariasis mendapatkan tatalaksana penanganan sesuai standar
Definisi Operasional	Cakupan pelayanan penderita Filariasis adalah persentase kasus Filariasis yang dilakukan tatalaksana minimal 7 kali kunjungan rumah di wilayah kerja Puskesmas dalam waktu satu tahun.
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah Kasus Filariasis yang dilakukan tatalaksana Filariasis
Denominator	Jumlah Kasus Filariasis yang ditemukan dalam 1 tahun x 100%
Sumber data	Laporan P2 Filariasis, SP2TP
Standar	100%
Langkah kegiatan	Penegakan diagnosa, tatalaksana, Monev dan Promkes
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas

15. Pelayanan Promosi Kesehatan

Judul	Pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Pengkajian dan pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga dengan melihat 10 indikator perilaku di rumah tangga

Definisi Operasional	Cakupan rumah tangga ber-PHBS adalah persentase rumah tangga yang melaksanakan 10 indikator PHBS rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan sekali
Periode Analisa	1 bulan sekali
Nominator	jumlah rumah tangga ber-PHBS di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	jumlah seluruh rumah tangga yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Hasil pendataan PHBS
Standar	70 %
Langkah Kegiatan	Penentuan RT yang disurvei, kunjungan rumah, pengkajian, analisa, tindak lanjut
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas

16. Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Judul	Cakupan pengawasan rumah sehat
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Mengawasi rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan yaitu rumah yang memiliki jamban sehat, sarana air bersih, pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai yang tidak terbuat dari tanah (kedap air)
Definisi Operasional	Cakupan pengawasan rumah sehat adalah persentase jumlah rumah sehat yang ada di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu 1 tahun
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan sekali
Periode analisa	1 bulan sekali
Nominator	Jumlah rumah sehat di suatu wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah rumah yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun

Sumber data	Buku catatan kegiatan di lapangan Buku kunjungan lapangan Register kesehatan lingkungan Register penyuluhan Laporan LB4 & LSDD
Standar	100 %
Langkah kegiatan	Pemantauan langsung ke rumah warga
Penanggung jawab	Programer Kesling

17. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat

a. ASI Eksklusif

Judul	ASI Eksklusif
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Untuk meningkatkan kekebalan tubuh bayi serta membantu melindungi dari berbagai penyakit dan infeksi agar tidak mudah sakit
Definisi Operasional	Bayi yang diberi ASI Eksklusif adalah proses pemberian ASI Eksklusif pada bayi menginjak usia 6 bulan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap 3 bulan
Nominator	Semua bayi yang memperoleh ASI Eksklusif
Denominator	Semua bayi yang baru lahir
Sumber Data	Buku KIA
Standar	50 %
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas

b. Remaja Putri Mendapatkan TTD

Judul	Remaja putri mendapatkan TTD
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Untuk mencegah kematian dan komplikasi
Definisi Operasional	Persentase remaja putri mendapat TTD adalah jumlah remaja putri yang mendapat TTD secara rutin setiap minggu terhadap jumlah remaja putri yang ada dikali 100%.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan

Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah remaja putri mendapat TTD
Denominator	Jumlah seluruh remaja putri 12-18 tahun di sekolah dikali 100 %
Sumber Data	Laporan Gizi
Standar	30 %
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas

c. Persentase Balita Kurus Mendapat Makanan Tambahan

Judul	Persentase balita kurus mendapat makanan tambahan
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Untuk mencegah kematian dan komplikasi
Definisi Operasional	Persentase balita kurus mendapat makanan tambahan adalah jumlah balita kurus yang mendapat makanan tambahan terhadap jumlah balita kurus dikali 100%.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah balita kurus yang mendapat makanan tambahan
Denominator	Jumlah seluruh balita kurus yang ada dikali 100%
Sumber Data	Laporan Gizi
Standar	100 %
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas

18. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

a. Kunjungan Rawat Jalan Umum Mendapat Asuhan Keperawatan Individu

Judul	Kunjungan rawat jalan umum mendapat asuhan keperawatan individu
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Membina individu rawan kesehatan
Definisi Operasional	Jumlah pasien rawat jalan dalam gedung yang mendapat asuhan keperawatan individu langsung oleh perawat

Frekuensi pengumpulan data	1 bulan sekali
Periode analisa	1 bulan sekali
Nominator	Jumlah pasien yang mendapat asuhan keperawatan langsung oleh perawat pada rawat jalan
Denominator	Jumlah pasien yang dilakukan pengkajian, pemeriksaan fisik oleh perawat pada kunjungan rawat jalan, IGD di Puskesmas pada kurun waktu satu tahun dikali 100%
Sumber data	SP3 LB 4 R1,R2 PHN
Standar	100%
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas

b. Cakupan Keluarga Mandiri III dan IV

Judul	Cakupan Keluarga Mandiri III dan IV
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Membina keluarga sampai dengan 6 kali kunjungan
Definisi Operasional	Cakupan hasil akhir tingkat kemandirian Keluarga (KM III dan IV) pada keseluruhan keluarga dalam mengatasi masalah kesehatannya, setelah mendapatkan askep keluarga minimal 4 kali kunjungan .
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan sekali
Periode analisa	1 bulan sekali
Nominator	Jumlah keluarga rawan yang dibina yang memenuhi kriteria KM III dan IV di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Seluruh keluarga rawan yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun x 100%
Sumber data	SP3 LB 4 R1 R2 PHN
Standar	100%
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas

19. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat

a. Cakupan Pembinaan Kesehatan Gigi di Masyarakat

Judul	Cakupan pembinaan kesehatan gigi di masyarakat
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	pendekatan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan gigi, dengan mengintegrasikan upaya promotif, preventif, kesehatan gigi pada berbagai upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang berlandaskan pendekatan Primary Health care
Definisi Operasional	Cakupan UKBM adalah persentase UKBM yang mendapat pembinaan dari petugas puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu setahun
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan sekali
Periode analisa	1 bulan sekali
Nominator	jumlah UKBM yang mendapat pembinaan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	jumlah UKBM yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	Buku catatan pembinaan ke UKBM
Standar	80 %
Langkah kegiatan	Pendataan, pengaturan pelayanan dan petugas, pelayanan kesehatan tingkat pertama
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Pengembangan

b. Cakupan pembinaan kesehatan gigi dan mulut di SD/MI

Judul	Cakupan pembinaan kesehatan gigi dan mulut di SD/MI
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Pelayanan asuhan sistematis yang ditujukan bagi semua anak sekolah tingkat Pendidikan dasar dalam bentuk paket promotif, paket preventif, paket paripurna.

Definisi Operasional	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan mulut siswa SD adalah persentase siswa SD yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut dari petugas Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan sekali
Periode analisa	1 bulan sekali
Nominator	Jumlah siswa SD yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut oleh petugas Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah siswa SD yang berada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun x 100%
Sumber data	Catatan pembinaan yang dilakukan ke SD/MI
Standar	80 %
Langkah kegiatan	Pendataan, pengaturan pelayanan dan petugas, pelayanan kesehatan tingkat pertama
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Pengembangan

20. Pelayanan Kesehatan Kerja

Judul	Jumlah pos upaya kesehatan kerja (UKK) yang terbentuk di Wilayah Kerja Puskesmas
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Pembinaan kesehatan kerja dalam pelayanan kesehatan bagi pekerja yang meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit akibat kerja, promotif, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan yang merupakan hak-hak dasar pekerja
Definisi Operasional	Jumlah Pos UKK yang terbentuk minimal 1 (satu) Puskesmas terbentuk 1 (satu) Pos UKK di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	1 tahun 2 kali
Periode analisa	1 tahun 2 kali
Nominator	Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja

	Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.
Denominator	1 (satu) pos UKK yang terbentuk yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%
Sumber data	Ada laporan/catatan kegiatan kesehatan kerja (Pos UKK) di Puskesmas sesuai kebutuhan lingkungan berupa Pembinaan kesehatan kerja di Pos UKK (Promotif, Preventif, Kuratif)
Standar	100%
Langkah kegiatan	Pendataan, sosialisasi, perencanaan kegiatan pelayanan dan Monev
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Pengembangan

21. Pelayanan Kesehatan Olahraga

Judul	Pembinaan kelompok olahraga
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani melalui aktifitas fisik dan/atau olahraga
Definisi Operasional	cakupan pembinaan kelompok olahraga adalah cakupan kelompok olahraga di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun, yang mendapat pembinaan dari petugas Puskesmas
Frekuensi pengumpulan data	1 tahun 2 kali
Periode analisa	1 tahun 2 kali
Nominator	Jumlah kelompok olahraga yang mendapat pembinaan dari petugas Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh kelompok olahraga yang berada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	Format laporan kesehatan olahraga Puskesmas
Standar	100%
Langkah kegiatan	Perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Pengembangan

22. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer

Judul	Pembinaan Kelompok Taman Obat Keluarga (TOGA)
Dimensi Mutu	Kualitas dan kuantitas
Tujuan	Membina kelompok TOGA
Definisi Operasional	Cakupan Pembinaan Kelompok TOGA adalah Cakupan Kelompok TOGA yang dibina oleh petugas Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	6 bulan sekali
Periode analisa	1 tahun sekali
Nominator	Jumlah kelompok TOGA yang mendapat pembinaan dari petugas Puskesmas
Denominator	Jumlah kelompok TOGA yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	Register Pelayanan Kesehatan Tradisional
Standar	100%
Langkah kegiatan	Perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Pengembangan

23. Pelayanan Kesehatan Indera

a. Penanganan Kasus Kelainan Refraksi

Judul	Penanganan kasus kelainan refraksi
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Pemberitahuan kepada orang tua murid tentang gangguan refraksi untuk ditidakanjuti dengan pemeriksaan ulang ke dokter mata untuk diberikan kaca mata sesuai dengan ukurannya
Definisi Operasional	Cakupan penanganan kasus kelainan refraksi adalah persentase jumlah penanganan kasus dengan kelainan refraksi pada siswa kelas V s.d IX di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	3 bulan sekali
Periode analisa	3 bulan sekali
Nominator	Jumlah kasus kelainan refraksi yang ditangani pada siswa kelas V s.d IX di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun

Denominator	Jumlah kasus kelainan refraksi yang ditemukan pada siswa kelas V s.d IX di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	Buku catatan kelainan refraksi
Standar	100%
Langkah kegiatan	Persiapan pra pelayanan, kompetensi tenaga, waktu pelayanan, rujukan, pencatatan dan pelaporan
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Pengembangan

b. Cakupan skrining katarak

Judul	Cakupan skrining katarak
Dimensi Mutu	Kualitas dan keselamatan
Tujuan	Untuk mengetahui jumlah katarak yang akan mendapatkan pelayanan promotif, preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Definisi Operasional	Cakupan skrining katarak adalah persentase jumlah skrining katarak pada siswa kelas V s.d IX dan pada umumnya penduduk usia 30 s.d usia 70 tahun dengan jarak pandang dari 3 meter diwilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	3 bulan sekali
Numerator	Jumlah siswa kelas V s.d IX dan pasien dengan keluhan jarak pandang kurang dari 3 meter yang di skrining katarak pada di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah siswa kelas V s.d IX dan pasien dengan keluhan jarak pandang kurang dari 3 meter di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Laporan hasil penjarangan anak sekolah
Standar	100%
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Pengembangan

24. Pelayanan Kesehatan Pengembangan Lainnya

a. Cakupan Kelengkapan Surveilans Terpadu Penyakit

Judul	Cakupan kelengkapan surveilans terpadu penyakit
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Penyelenggaraan surveilans Epidemiologi terhadap beberapa kejadian, permasalahan dan faktor risiko masalah penyakit menular dan tidak menular
Definisi Operasional	Cakupan kelengkapan Surveilans Terpadu Penyakit adalah cakupan kelengkapan pengumpulan data hasil pengamatan penyakit bulanan di wilayah Puskesmas dalam waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah laporan STP yang dilaporkan Puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Denominator	12 bulan x 100%
Sumber data	Laporan kelengkapan/ketepatan STP Puskesmas
Standar	100 %
Langkah kegiatan	Perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Pengembangan

b. Cakupan Ketepatan Surveilans Terpadu Penyakit

Judul	Cakupan ketepatan surveilans terpadu penyakit
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Untuk membantu penyelenggaraan kegiatan surveilans Epidemiologi terhadap beberapa kejadian, permasalahan dan faktor risiko masalah penyakit menular dan tidak menular
Definisi Operasional	Cakupan ketepatan Surveilans Terpadu Penyakit adalah cakupan ketepatan pengumpulan data hasil pengamatan penyakit bulanan di wilayah Puskesmas dalam waktu satu tahun.
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan

Periode analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah laporan STP yang dilaporkan Puskesmas tepat waktu pada kurun waktu satu tahun
Denominator	12 bulan x 100%
Sumber data	Laporan kelengkapan/ ketepatan STP Puskesmas
Standar	100 %
Langkah kegiatan	Perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung jawab	Penanggung Jawab UKM Pengembangan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2020
BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 3 Desember 2020.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 129 SERI 1